

## Laporan Keuangan Pemda Membaik

**BANDUNG, (PR).-**

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) wilayah Jawa Barat menunjukkan perbaikan selama tiga tahun terakhir (2009-2011). Namun demikian, hal itu bukan jaminan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah bebas dari permasalahan.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, Selamat Kurniawan, menyebutkan, selama tiga tahun ke belakang, kinerja laporan keuangan pemerintah daerah Jabar menunjukkan perbaikan. Hal itu dilihat dari semakin berkurangnya opini Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer*) oleh BPK dari tahun ke tahun selama periode tahun anggaran 2009-2011.

"Selama rentang waktu itu, gradasinya cenderung membaik. Opini *disclaimer* terus berkurang," ujarnya kepada

"PR" seusai seminar "BPK & Keuangan Negara" di Grha Sanusi Unpad, Jln. Dipati Ukur, Bandung, Kamis (18/10).

Dia menyebutkan, pada tahun 2009, empat kab./kota dari dua puluh tujuh kab./kota di Jabar yang diperiksa, mendapatkan opini *disclaimer* dari BPK, yakni Kota Bandung, Kota Bekasi, Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. "Pada 2011, tidak ada lagi kab./kota di Jabar yang mendapatkan *disclaimer*. Malah, ada perbaikan menuju opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP)," ujarnya.

Dia menyebutkan, ketiga daerah yang mendapatkan opini WTP itu adalah Provinsi Jabar, Kota Depok, dan Kota Banjar. Sementara sisanya mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Dalam pemberian opini, terdapat empat jenis yang diberikan

oleh BPK, yakni WTP, WDP, Disclaimer, dan Tidak Wajar.

Selamat menambahkan, pemberian opini tersebut hanya mengungkapkan laporan keuangan pemda yang berdasarkan kriteria tertentu, seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap undang-undang, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Mengomentari kemungkinan Provinsi Jabar mengeluarkan obligasi daerah karena sudah mendapatkan opini WTP pada tahun lalu, dia mengatakan, hal tersebut mungkin saja terjadi.

"Bila sudah mendapatkan WTP, memang laporan keuangannya bisa dikatakan sudah transparan, terperinci, dan pengelolaan keuangannya pun sudah sesuai aturan. Hal seperti itu bisa digunakan oleh banyak pihak, termasuk menja-

di acuan bagi investor untuk melihat akuntabilitas sebuah lembaga," tuturnya.

Sementara itu, anggota BPK RI di bidang politik hukum dan HAM, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam kunjungannya ke Redaksi "PR" di Jalan Soekarno-Hatta 147 Bandung mengatakan, laporan keuangan suatu lembaga bukan menjadi jaminan bahwa permasalahan, salah satunya seperti korupsi bisa menjadi tuntas.

Menurut dia, BPK memeriksa keuangan suatu lembaga melalui kriteria-kriteria tertentu yang lebih menitikberatkan pada pengelolaan keuangannya. Terbuka kemungkinan, bila dalam pengelolaan tersebut terdapat oknum-oknum tertentu yang berkolusi sehingga memengaruhi keuangan suatu lembaga seolah-olah sehat, padahal kenyataannya tidak. (A-204)\*\*\*



ADE BAYU INDRAGA/PR

KEPALA Perwakilan BPK Jabar, Selamat Kurniawan (kiri) menyampaikan sambutannya, saat berkunjung ke Redaksi "PR", Jln. Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (18/10). Berbagai hal dibicarakan pada kunjungan tersebut, dalam rangka memerangi korupsi yang merugikan negara.\*